

## **BAB II**

### **POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK**

Di abad ke-21 situasi politik internasional semakin kompleks, setiap negara berlomba untuk mengkondisionalkan atau menstabilkan situasi dalam negerinya dan melindungi diri dari ancaman luar. Maka demikian demi kemajuan negaranya, setiap negara ingin menjadi sebuah bangsa yang memiliki power. Negara akan melakukan segala cara untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasional mereka. Tentunya untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasional tersebut dalam menghadapi politik internasional setiap Negara akan memiliki politik luar negerinya masing – masing yang merupakan strategi atau rencana tindakan, sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Tiongkok sendiri merupakan Negara yang sangat spesifik dengan tujuan dan kepentingan Negara mereka. Tiongkok merupakan salah satu negara di Asia yang bangkit dari krisis keterpurukan yang kemudian telah berkembang menjadi Negara dengan ekonomi berorientasi ekspor, terintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat internasional. Perubahan tersebut membuktikan Tiongkok sebagai negara paling dinamis di dunia dalam hal ekonomi, politik dan militer dan memiliki politik luar negeri yang dinamis dan unik.

Dengan demikian dalam BAB II ini membahas peran Politik luar negeri Tiongkok dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasional Tiongkok.

## **A. Negara Republik Rakyat Tiongkok**

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau bisa juga disebut dengan Tiongkok adalah Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia. Jumlah Penduduk Tiongkok yang sebanyak 1,37 miliar. Tiongkok mempunyai 56 suku bangsa, dan Suku Han adalah suku bangsa terbesarnya. Mayoritas Agama penduduk Tiongkok adalah Taoisme, Budha, dan Islam. Sedangkan untuk bahasanya yang digunakannya yaitu Tiongkok (Mandarin) dan Kanton (Nurjanah, 2016)..

Tiongkok merupakan sebuah negara yang sangat luas, yaitu sekitar 9.596.960 Km<sup>2</sup>, atau mencakup hampir seluruh wilayah Asia Timur, sehingga menjadikan negara ini negara terbesar keempat di dunia. Negara tetangganya antara lain ada Rusia, Mongolia, Kazakstan, Kirgistan, Nepal, India, Bhutan, Myanmar, Vietnam, Laos, Macau, dan Korea Utara. Sedangkan untuk lautan dan samudra terdekatnya yaitu, Samudra Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. Ibu Kota Tiongkok adalah Beijing (Nurjanah, 2016).

**Gambar 1: Peta Wilayah Tiongkok**



Sumber: <http://id.maps-shanghai.com/shanghai-Tiongkok-peta-dunia>

Tiongkok juga telah menjadi salah satu negara yang geliat dan pengaruhnya patut diperhitungkan baik dalam skala regional maupun global. Aspek politik, ekonomi, dan militer merupakan wilayah kerja Tiongkok untuk menunjukkan ambisinya sebagai Negara *superpower*. Kemampuan Tiongkok untuk tampil sebagai aktor *superpower* global diabad 21 dapat dibuktikan dengan adanya fakta kehadiran Tiongkok sebagai aktor ekonomi terbesar dunia (world's largest economy), aktor berpengaruh dalam politik internasional (the influential actor in international politics), serta aktor militer kuat (strong

military actor) yang tidak terbantahkan (Roy, 1998). Sebagai salah satu Negara dengan perekonomian terbesar di dunia, pendapatan Produk Bruto Domestik atau PDB milik Tiongkok adalah sebesar 12 triliun dollar Amerika di tahun 2016. Tiongkok juga merupakan penghasil utama beberapa komoditas penting seperti Emas, Perak, Tembaga, Batu bara, Timah, Nikel, Aluminium, Besi dan lain sebagainya (Dickson, 2018).

Sebagai Negara yang berpengaruh dalam politik internasional, Tiongkok memiliki reputasi sebagai Negara yang terus berperan aktif dalam dunia politik internasional. Yang mana Tiongkok mengambil bagian aktif dalam kegiatan diplomatik internasional multilateral, mempertahankan dan memperkuat peran otoritatif dan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Dewan Keamanan dan melakukan upaya konstruktif dalam organisasi regional. Kemudian sebagai Negara dengan militer yang kuat bisa dilihat dari kapasitas militer Tiongkok, yang mana Tiongkok memiliki berbagai jenis peralatan militer modern baik di bidang armada darat, udara, maupun laut yang modern. Selain kapasitas, mengukur kekuatan militer Tiongkok juga dapat tinjau dari alokasi anggaran militer Tiongkok. Tiongkok telah menaikkan anggaran militernya selama lima tahun ini yaitu, dinaikkan 12,7 persen pada tahun 2011, 11,2 persen pada tahun 2012, serta 10,7 persen pada tahun 2013. Dengan anggaran militer yang sedemikian besarnya, tidak mengherankan jika angkatan militer Tiongkok memiliki kuantitas maupun kualitas yang mampu membawa Tiongkok menjadi aktor militer kuat di dunia internasional (Lisbet, 2012).

Tiongkok secara politik pemerintahannya dikuasai oleh satu partai saja yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Pemerintahan Tiongkok didampingi oleh Partai Komunis dalam menjalankan tugas kenegaraan. Oleh karena itu, Partai Komunis memiliki peran dalam menentukan sebuah kebijakan. Kemudian dalam pemilihan kepemimpinan, pemimpin negara dan Partai Komunis dipilih langsung oleh partai melalui kongres. Tiongkok sebagai penganut komunisme menjadikan dasar ideologi ini sebagai panduan ajaran, pandangan dan filsafat untuk mencapai tujuan dan norma baik dalam politik maupun sosial. Dengan mengamalkan komunisme, Tiongkok mampu membentuk tatanan politik yang penuh dalam menentukan sebuah kebijakan. Sehingga pemerintah Tiongkok bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan nasionalnya (Dickson, 2018).

## **B. Prinsip Politik Luar Negeri Tiongkok**

Politik luar negeri bagi Tiongkok memiliki peran penting bagi kemakmuran kondisi nasionalnya. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan luar negeri yang diformulasikan kepada negara lain atau kancah internasional sangat krusial bagi kemajuan nasionalnya. Oleh karena itu, suatu Negara akan memiliki prinsip dalam politik luar negerinya yang mana prinsip ini akan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara agar dapat memenuhi kepentingan nasional mereka.

Sebagai Negara Komunis yang berpola pemerintah otoriter, politik luar negeri Tiongkok banyak bergantung terhadap perspektif kepentingan

nasional menurut elit politiknya yang berkuasa. Arah politik luar negeri Tiongkok saat ini didasari oleh *Chinese Dream* oleh Presiden Xi Jinping. *Chinese Dream* merupakan arah politik luar negeri Tiongkok yang bertujuan untuk memperbaharui Tiongkok dan mengembalikannya kepada masa kejayaannya di masa lalu sebagai negara yang berpengaruh di Asia. Tidak hanya itu, adanya keinginan Tiongkok untuk dihormati internasional sebagai kekuatan besar, diperkuat dengan pidato Xi Jinping yang menyebutkan bahwa Tiongkok harus mulai menerapkan diplomasi *great power* berdasarkan kearifan Tiongkok (Angela Poh, 2017).

Kemudian Xi Jinping dalam politik luar negeri Tiongkok telah meningkatkan budaya damai melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Kebijakan tersebut menganut dan meneruskan budaya tradisional yang turun temurun dari para pemimpin Tiongkok sebelumnya yang mana dalam melaksanakan kegiatan politik luar negerinya Tiongkok sangat mengedepankan penggunaan “soft power” dan menekankan cara-cara damai atau lebih kepada penggunaan kerjasama daripada perang dan cara cara kasar lainnya. Tiongkok menerapkan kebijakan damai yang independen, dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian dan mempertahankan kedaulatan. Kemandirian bagi Tiongkok merupakan hal penting yang menjadi dasar kiprahnya di kancah Global. Kebijakan dan posisi politik luar negeri Tiongkok bergantung dengan konteks yang ada. Hal tersebut telah menjadikan Tiongkok tetap tegas dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan, wilayah dan

masalah di dalam negerinya. Ketegasan tersebut menjadi sebuah karakteristik Tiongkok dalam politik luar negerinya (Pike).

Demikian, dalam menjalankan politik luar negerinya Tiongkok akan selalu mengutamakan kebijakan yang damai dan independent, mendukung penanganan masalah internasional sejalan dengan kepentingan-kepentingan mendasar dari masyarakat Tiongkok dan dunia. Tiongkok berkeyakinan bahwa konflik dan pertikaian diantara negara-negara harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan menentang ancaman atau penggunaan kekuatan, hegemoni dan politik internasional baru yang rasional dan adil serta membangun hubungan persahabatan dan kerjasama dengan seluruh negara di dunia berdasarkan “Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai”, yaitu: saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, saling tidak mengagresi, saling tidak campur tangan dalam urusan negara, sama derajat dan saling menguntungkan, dan hidup berdampingan secara damai (Andrean, 2015).

### **C. Tujuan Dasar Politik Luar Negeri Tiongkok**

Tiongkok secara konsisten menjunjung tinggi perdamaian dan pembangun negaranya. Melalui prinsipnya, politik luar negeri Tiongkok memiliki tujuan dasar untuk mengupayakan lingkungan internasional yang damai dan stabil, lingkungan bertetangga, setara dan iklim yang saling menguntungkan untuk kerja sama, pengakuan obyektif dan positif dari komunitas internasional, dan untuk memfasilitasi program membangun masyarakat Tiongkok yang makmur serta memberikan peluang strategis bagi

pembangunan dalam negaranya (Embassy of The People's Republic of Tiongkok In The Republic of Albania, 2008).

Kemudian tujuan lain dari politik luar negeri Tiongkok adalah untuk meningkatkan perannya di lingkungan internasional agar Tiongkok dapat diakui sebagai Negara *superpower* dan memiliki peran penting dalam tatanan global (Muchtar, 2011). Untuk mendukung tujuan tersebut para elit dan pemimpin Tiongkok percaya bahwa ada 4 kepentingan yang harus dijadikan fokus utama dalam tujuan politik luar negeri Tiongkok. Dibawah ini uraian lebih detail mengenai 4 kepentingan utama tersebut:

1. Kestabilan Keadaan Domestik

Kestabilan keadaan domestik Negara berperan penting dalam meningkatkan peran Tiongkok di lingkungan internasional (Muchtar, 2011). Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ilmuwan politik Tiongkok dan juga komentator politik Yongnian Zheng bahwa, “menjadi kuat di dalam negara sendiri berarti mandiri dan berpengaruh di bidang Internasional.” Kestabilan keadaan domestik menjadi fokus politik luar negerinya karena Tiongkok mengalami berbagai masalah internal kaitanya dengan masalah keutuhan wilayahnya serta adanya ketidaksetaraan dan perbedaan dalam masyarakatnya. Tercatat berbagai upaya separatisme dilakukan oleh masyarakat Tiongkok (Muchtar, 2011)..

Setelah Tiongkok menjadi Negara republik, banyak wilayah yang melakukan gerakan separatisme untuk menjadi wilayah yang berdaulat



diluar kekuasaan Tiongkok, seperti upaya yang dilakukan wilayah Tibet untuk memisahkan diri dari Tiongkok dan juga gerakan separatisme Xinjiang yang merupakan salah satu kawasan strategis di negara Tiongkok. Kedua isu separatisme tersebut walaupun telah diselesaikan oleh Tiongkok dan berakhir dengan kemenangan Tiongkok yang tetap memiliki kekuasaan terhadap dua wilayah tersebut, membuat pemerintah Tiongkok terus mewaspadaai apabila terjadi lagi gerakan yang mengancam keastabilan dan keutuhan domestik Negaranya karena bagi mereka adanya kestabilan dalam Negara dapat meningkatkan kepercayaan diri Tiongkok di pergaulan internasional (Muchtari, 2011).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pelaksanaan pembangunan dalam negeri erat kaitannya dengan kestabilan pertumbuhan ekonomi negara. Maka dari itu, kepentingan pembangunan ekonomi mereka menjadi salah satu fokus politik luar negerinya. Sebelum memulai reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan hampir 40 tahun yang lalu, Tiongkok mempertahankan kebijakan yang membuat keadaan ekonomi negaranya tidak berkembang, hal tersebut di karenakan sistem perdagangan Tiongkok cenderung lebih dikendalikan oleh pusat, sangat tidak efisien, dan relatif terisolasi dari ekonomi global.

Maka dari itu demi kepentingan pertumbuhannya, Tiongkok mulai membuka diri dengan menjalin hubungan baik dengan dunia internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk

menjamin terciptanya lingkungan yang inducif bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Diawali dengan membuka perdagangan luar negeri dan investasi serta menerapkan reformasi pasar bebas pada tahun 1979, Tiongkok telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil tahunan rata-rata 9,5% hingga 2017, kecepatan yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai "ekspansi berkelanjutan tercepat oleh ekonomi utama dalam sejarah." Pertumbuhan seperti itu memungkinkan Tiongkok, rata-rata, untuk menggandakan PDB setiap delapan tahun dan membantu meningkatkan sekitar 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Tiongkok telah menjadi ekonomi terbesar di dunia, produsen, pedagang barang dagangan, dan pemegang devisa cadangan (Morrison, 2014).

Transformasi Tiongkok dari yang awalnya sempat menerapkan praktek isolasionis beralih memfokuskan politik luar negerinya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi telah berhasil melahirkan Tiongkok yang baru. Tiongkok mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan keberadaanya diakui sebagai salah satu "great power" dalam tatanan dunia internasional.

### 3. Keamanan Nasional

Dalam politik internasional, gagasan keamanan secara alami berkembang bersama kepentingan nasional. Kepentingan keamanan nasional menjadi hal mutlak yang perlu dijaga oleh pemerintah agar stabilitas keamanan Negara tetap terjaga. Bagi Tiongkok, istilah

"keamanan nasional" mencakup keamanan domestik / internal dan asing / eksternal dan, oleh karena itu, memiliki konotasi yang jauh lebih luas (Sun, 2013).

Pada awalnya, perhatian utama Tiongkok atas keamanan negaranya adalah *survivalitas*. Namun sekarang, keamanan nasional Tiongkok tidak hanya berpusat pada *survivalitas* tetapi juga mencakup tujuan pembangunan yang lebih luas yang melampaui wilayah negaranya karena pembangunan Tiongkok saat ini membutuhkan lingkungan internasional yang damai untuk jangka panjang, terutama lingkungan peripheri yang konstruktif (Wenmu, 2006).

Tentu dalam keamanan suatu negara sangat erat kaitannya dengan keadaan militer negara tersebut. Untuk menjaga kepentingan keamanan Negara suatu Negara harus meningkatkan dan melindungi kemampuan militernya. Maka dari itu, sebagai bentuk kesungguhan Tiongkok dalam mengamankan kepentingan nasionalnya serta turut berpartisipasi mewujudkan stabilitas keamanan global, Tiongkok kerap melakukan berbagai kerjasama militer baik secara bilateral maupun multilateral (Matsuda, 2014, p. 1). Militer menjadi instrumen untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integrasi teritorialnya, serta mencegah musuh yang dapat mengganggu kepentingan nasional Tiongkok (Yulianto, 2009). Oleh karena itu, Tiongkok tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatan militernya demi kepentingan keamanan Negara.

#### 4. Kerjasama Regional

Untuk menerapkan prinsip suka perdamaian dan mencapai kepentingan nasionalnya tentu Tiongkok tetap membutuhkan peranan negara lain untuk mewujudkannya. Baik kepentingan dari segi politik, ekonomi, keamanan, maupun kepentingan lainnya. Maka dari itu Kerjasama Regional menjadi fokus politik luar negeri Tiongkok yang berperan sangat penting demi kepentingan Negara. Dalam kerjasama regional, Tiongkok kerap mengembangkan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain akan mendukung terciptanya dunia yang aman dan damai (Embassy of The People's Republic of China In The Republic of Albania, 2008).

Dalam hal ini Tiongkok membentuk model hubungan internasional baru yang didasari dengan Lima Prinsip Koeksistensi Damai sesuai dengan tujuan politik luar negerinya, untuk menciptakan dunia yang aman dan damai. Lima prinsip tersebut terdiri dari, yakni saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, tidak ada agresi bersama, tidak ada campur tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan dan saling menguntungkan dan hidup berdampingan secara damai (Embassy of The People's Republic of China In The Republic of Albania, 2008).

Tiongkok memperdalam kerjasama saling menguntungkan tersebut dengan negara-negara berkembang lainnya dan melindungi kepentingan bersama mereka. Mengikuti prinsip yang mana memperlakukan tetangga

sebagai teman dan mitra, akan memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memperdalam kerja sama regional. Kemudian meningkatkan hubungannya dengan negara-negara maju dalam mencari landasan bersama yang lebih luas dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang tepat (Embassy of The People's Republic of China In The Republic of Albania, 2008).

#### **D. Strategi Politik Luar Negeri Tiongkok**

Dalam perjalanannya menuju tujuan untuk tumbuh menjadi kekuatan global yang besar dan kuat dan memiliki peran penting dalam tatanan global, Tiongkok tentu akan melihat perubahan luar biasa dalam lingkungan internal dan eksternal dan bertemu dengan berbagai masalah dan tantangan dalam melaksanakan politik luar negerinya. Mengingat situasi tersebut, Tiongkok tentu akan mengubah pemikiran strategisnya sesuai dengan kondisi atau isu yang dialaminya. Namun Tiongkok akan tetap berpegang teguh dengan prinsip politik luar negerinya yang mana Tiongkok akan terus mempromosikan multipolarisasi dunia yaitu persebaran kekuasaannya dalam sistem internasional, demokrasi dalam hubungan internasional dan diversifikasi mode pembangunan, serta kedamaian. Demikian, Pemerintah Tiongkok dan para elit negara bersedia melakukan upaya tak henti-hentinya untuk tujuan bersama mempertahankan dan mempromosikan perdamaian, pembangunan dan kemajuan bersama dengan semua negara lain di komunitas internasional (Pike).

Seperti yang ditulis oleh Sun Jianguo dalam *Tiongkok Daily* pada 18 Juni 2014 bahwa Tiongkok harus beradaptasi dengan situasi yang berubah dan mengeksplorasi kerangka kerja baru untuk kerja sama demi kepentingan dan keamanan regional. Pembentukan mekanisme kerjasama regional yang komprehensif, tertib, inklusif, prinsip kerjasama win-win dan terkoordinasi adalah jaminan kelembagaan yang kuat untuk resolusi masalah regional (Pike).

Kemampuan Tiongkok untuk tampil sebagai aktor *superpower* global diabad 21 memberikan Tiongkok kapasitas juga kemampuan untuk memperluas basis hubungan internasionalnya sehingga dapat meningkatkan suaranya atas pembuatan peraturan sistem internasional. Demikian Tiongkok dapat memainkan peran aktif dan positif dalam reformasi sistem internasional dan tatanan internasional serta menerapkan tekanan lebih besar dalam semua konflik isu internasional maupun regional. Aspek politik, ekonomi, dan militer merupakan wilayah kerja Tiongkok untuk menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan adidaya global baru. Dalam politik luar negerinya, berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Negaranya, kekuatan ekonomi Tiongkok yang kuat dan juga kekuatan militernya yang terus berkembang menjadikan keduanya instrumen yang penting dalam strategi politik luar negeri Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasionalnya .

Di wilayah Asia Pasifik, sebagai salah satu Negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 1990-an yang menjadikannya sebagai kekuatan dominan di Asia timur, Tiongkok memiliki keinginan untuk memainkan peran kepemimpinan. Oleh karena itu, Tiongkok melalui

kerjasama regional mencoba menggunakan instrument kekuatan ekonominya untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Tiongkok memulai agenda ambisius menggunakan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai Tiongkok, investasi Tiongkok, dan persyaratan perdagangan yang menguntungkan sebagai alat untuk memperluas kekuasaannya, sambil meyakinkan dunia bahwa itu akan menjadi kekuatan regional yang damai yang dapat memberikan negara-negara lain peluang untuk makmur, yang mana Tiongkok akan mengarahkan ekonomi global ke arah yang kondusif bagi kesejahteraan bersama semua Negara (Harrell, 2018, p. 5).

Selain menjadi instrumen yang baik untuk menjalin kerjasama regional, kekuatan ekonomi yang Tiongkok miliki juga digunakan Tiongkok sebagai alat dalam strateginya untuk membalas Negara-negara yang memberikan ancaman terhadap kepentingan Negara Tiongkok. Tiongkok telah menggunakan kebijakan hukuman perdagangan sebagai instrumen paksaan selama ketegangan di masa lalu, dan tentu bisa Tiongkok gunakan dalam sengketa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Misalnya, melalui tarif perdagangan, pembatasan pariwisata, dan batasan investasi langsung asing (Pike).

Dibawah merupakan berbagai isu dengan Negara-negara lain yang dibalas oleh Tiongkok dengan kekuatan ekonominya (Harrell, 2018, pp. 9-10):

1. Pada 2012, Tiongkok membatasi impor buah ke Filipina selama puncak ketegangan di Scarborough Reef, tetapi para pemimpin Tiongkok menghindari mengambil tindakan ekonomi besar selama friksi dengan

Vietnam dan Filipina pada 2014, dikarenakan Tiongkok mempertimbangkan dampak yang akan diterima negaranya.

2. Pada tahun 2010, Tiongkok menggunakan langkah-langkah ekonomi koersif terhadap Norwegia setelah pemberian *Nobel Peace Prize* 2010 untuk pembangkang Tiongkok yaitu Liu Xiaobo. Tiongkok kemudian memutuskan hubungan diplomatik perdagangan dan menggunakan serangkaian tindakan sanitasi dan peraturan untuk secara signifikan memotong impor salmon Norwegia ke Tiongkok.
3. Pada bulan September 2010, kapal pukat Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli Jepang di rantai pulau Senkaku/Diaoyu yang disengketakan, dan Jepang menahan nakhoda milik Tiongkok tersebut. Setelah konfrontasi, Tiongkok menghentikan ekspornya, input teknologi utama, ke Jepang. Pertikaian terkait pulau Senkaku/Diaoyu kembali terjadi pada tahun 2012, ketika pemerintah Jepang membeli beberapa tanah di pulau tersebut dari pemilik pribadinya. Kali ini, Tiongkok mengambil langkah lebih kecil untuk mendorong boikot terhadap barang-barang Jepang dan memungkinkan protes yang merusak perusahaan Jepang di Tiongkok.
4. Tiongkok memiliki sejarah panjang pembalasan dengan berbagai cara melawan negara-negara yang menjadi tuan rumah pemimpin Tibet Dalai Lama yang dianggap Tiongkok sebagai separatist. Pada November 2016, Dalai Lama mengunjungi Mongolia untuk mengadakan acara publik. Tiongkok menanggapi kunjungan ini dengan menaikkan biaya untuk



produk-produk pertambangan Mongolia, menciptakan cadangan di persimpangan perbatasan utama, menanggihkan interaksi bilateral, dan memutuskan pembicaraan mengenai pinjaman besar.

5. Sejak 2006, Tiongkok telah menentang keras Program Nuklir milik Iran. Isu ini telah berlangsung sampai pada tahun 2016, yang mana Tiongkok terus melakukan tekanan ekonomi terhadap Iran dalam menanggapi program nuklirnya. Adapula pada tahun 2012 dan 2013, Tiongkok menurunkan impor minyak Iran lebih dari 20 persen dan Perusahaan-perusahaan milik Negara Tiongkok juga mengurangi pekerjaan mereka di Iran.
6. Kemudian pada tahun 2017, Pengungkapan pemerintah Australia mengenai pengaruh Tiongkok dalam politik Australia, dan langkah-langkah legislatif untuk melawan pengaruh ini, telah meningkatkan ketegangan antara kedua Negara. Sebagai tanggapan, Tiongkok membuat gerakan yang lebih memperlihatkan pengaruhnya dengan memperluas alat paksaannya dengan menggunakan siswa-siswa Tiongkok yang membayar biaya kuliah di Australia sebagai cara pemaksaan seperti memotong pariwisata. Pendidikan adalah ekspor terbesar ketiga Australia. Pelajar Tiongkok hampir 40 persen dari pendaftar asing di Australia dan menyumbang hampir sepertiga dari pendapatan Negaranya.

Sebagai Negara yang cenderung menghindari konflik dengan negara-negara dunia terutama yang dapat mengancam keamanan negaranya yang merupakan salah satu fokus utama politik luar negerinya dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Tiongkok akan mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya tersebut, dalam hal ini Ekonomi bagi Tiongkok merupakan instrumen yang paling menguntungkan dan aman untuk digunakan dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Karena permasalahan keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi Tiongkok, Tiongkok lebih mengutamakan mengambil tindakan yang cenderung tidak menggunakan *hard power* dengan menjalankan prinsip-prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi. Prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi Tiongkok ini diwujudkan melalui terminologi “peaceful rise”, yang kemudian dijadikan salah satu bentuk politik luar negeri Tiongkok, yang mana Pemerintah Tiongkok menyatakan negaranya tidak akan menjadi ancaman bagi Negara lain. Bentuk politik luar negeri Tiongkok dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan cenderung menghindari konfrontasi tersebut menunjukkan strategi Tiongkok dalam meraih dua hal sekaligus, yaitu memenuhi kepentingan nasional melalui pertumbuhan ekonomi domestiknya, serta penciptaan status sebagai “great power” yang cinta damai dan tidak hegemon di sistem internasional (Zakaria, 2008).

Dengan adanya prinsip tersebut, Tiongkok jarang sekali menggunakan instrumen militernya dalam sengketa antar Negara. Bagi Tiongkok, militer lebih baik digunakan sebagai langkah defensif ketimbang

offensif, sebagaimana dalam kepentingan keamanan negaranya bahwa militer merupakan instrumen untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integrasi teritorialnya, serta mencegah musuh yang dapat mengganggu kepentingan nasional Tiongkok namun tidak secara langsung digunakan untuk menyerang karena bagi Tiongkok hanya akan memanas suasana konflik bahkan menciptakan perang yang tidak diinginkan. Sehingga Tiongkok fokus untuk terus mengembangkan militernya demi kepentingan keamanan Negeranya ketimbang menggunakannya sebagai senjata untuk membalas Negara yang berkonflik dengannya (Yulianto, 2009).

Untuk meningkatkan kekuatan militernya, Tiongkok telah memodernisasi angkatan militernya selama dua dekade. Pertumbuhan dalam pembelanjaan pertahanannya hampir selalu melampaui pertumbuhan ekonominya yang spektakuler. Meningkatkan kemampuan udara dan misilnya, memodernisasi dan memperluas angkatan laut dan udaranya, dan mengadopsi postur-postur yang lebih agresif. Kekuatan Angkatan Laut dan Udara merupakan instrumen kunci dalam arsitektur pertahanan keamanan Tiongkok. Kekuatan ini pun semakin diperlengkapi dengan adanya dukungan personel militer terbesar di dunia. Kemudian Tiongkok telah berinvestasi dalam persenjataan senjata nuklir modern yang memberikannya strategis pencegah yang semakin aman (Hohein, 2017). Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Tiongkok juga tengah memperluas kapasitas negaranya di bidang regional maritime surveillance, membangun sejumlah kapal selam baru dan mengadakan modernisasi persenjataan. Adapun modernisasi persenjataan

yang dimaksud terutama pada *Conventional Ballistic and Land , Attack Cruise Missiles* yang merupakan *The Centerpiece of Tiongkok's Coercive Aerospace power* seperti *Short-Range Ballistic Missile*, Infrastruktur, *Medium-Range Ballistic Missiles*, *Ground Launched Cruise Missiles*, *Anti-ship Ballistic Missiles (ASBM)*, dll (Lisbet, 2012, p. 7).

Didedikasikan untuk multilateralisme dan konsep keamanan baru, Tiongkok menolak konsep keamanan tradisional yang berpusat pada pertentangan antara kekuatan utama atau hegemoni, Tiongkok menyerukan semua negara untuk mengusahakan keamanan yang kooperatif, kolektif dan bersama atas dasar saling percaya, saling menguntungkan, kesetaraan, dan kerja sama. Oleh karena itu, pada tingkat bilateral, Tiongkok secara aktif mempromosikan pengembangan hubungan tipe baru dan kemitraan antara kekuatan utama dan mencegah mundurnya hubungan negara mereka ke dalam pola lama permainan zero-sum yang mana keuntungan seseorang setara dengan kerugian orang lain, politik kekuasaan dan terorisme dalam segala bentuk, dengan demikian meningkatkan pembentukan tatanan internasional yang adil dan masuk akal. Dibawah ini merupakan pandangan Tiongkok dalam mengatasi adanya masalah keamanan dalam Negara (Pike).

1. Upaya yang dilakukan oleh banyak negara sebagai solusi masalah yang mengancam keamanan dalam Negara, seperti menggunakan *hard power* atau tindakan keras yang melibatkan kekuatan militer, bahkan senjata pemusnah massal bagi Tiongkok akan menghasilkan kemenangan total atau kerugian total.

2. Banyak masalah keamanan global muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Oleh karena itu, bagi Tiongkok perlu tidak hanya mengembangkan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan untuk menangani masalah keamanan tradisional, tetapi juga untuk membuat persiapan terlebih dahulu, terutama persiapan sistematis.
3. Semakin banyak kehadiran perusahaan dan masyarakat Tiongkok yang pergi ke luar negeri telah meningkatkan kebutuhan bagi negara mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan urusan keamanan internasional dan mengeksposnya pada masalah keamanan yang jauh lebih beragam dan rumit.